

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Moral Bangsa di Era Disrupsi

Lathifah Ulimatun Naila

lathifahun@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan yang penting karena sebagai basis pengembangan sikap dan kepribadian untuk membentuk warga negara yang memiliki karakter sesuai dengan Pancasila Menurut Ricardo L. Gracia, salah satu karakter warga negara Indonesia adalah yang menghargai identitas budaya masyarakat yang plural secara demokrasi. Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan sebagai mesin dalam menciptakan generasi bangsa untuk menghadapi masa depan dan menjadikan bangsa ini memiliki peradaban serta bermartabat di antara bangsa lain di dunia. Zaman yang selalu berkembang menuntut pendidikan untuk selalu menyesuaikan diri dan menjadi motor dalam proses pendewasaan dan pembangunan bangsa. Dalam konteks globalisasi, pendidikan di Indonesia perlu membiasakan anak-anak untuk memahami eksistensi bangsa dalam kaitan dengan eksistensi bangsa-bangsa lain dan segala persoalan dunia. Berkaitan dengan perkembangan zaman, kita telah memasuki yang namanya era disrupsi teknologi, pada era ini menuntut manusia di samping berpikir logis juga harus cakap dalam menyikapi perkembangan informasi yang telah dikemas dalam sistem digital. Ancaman yang mungkin kurang disadari oleh generasi saat ini berkaitan dengan munculnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah degradasi moral bangsa. Pendidikan kewarganegaraan perlu adanya untuk membangun moral bangsa agar bangsa Indonesia tidak terpengaruh adanya era disrupsi ini.

kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Era disrupsi, moral

PENDAHULUAN

Peran pendidikan kewarganegaraan sangat kuat kaitannya dengan adanya dua disrupsi yang luar biasa yaitu bidang teknologi karena revolusi industri 4.0 dan gaya hidup karena adanya perubahan generasi yang menyebabkan perubahan gaya hidup dua disrupsi ini akan berpengaruh dengan peserta didik dari SD,SMP,SMA sampai Mahasiswa pun terkena dampaknya. Di era disrupsi ini akan menjadikan zaman dahulu yang tidak mengerti elektronik harus dipaksa dengan memakai elektronik tersebut dengan tidak memakai maka akan tidak mengikuti zaman yang sekarang terkenal dengan zaman millenial. Adanya teknologi yang canggih membuat pendidikan harus mamu

untuk mengikuti zaman yang semakin pesat ini dengan memberikan teknologi canggih untuk pembelajaran seperti tersedianya komputer atau laptop, LCD dan sebagainya.

Perubahan sistem dalam peradaban manusia ini dapat berdaya guna bagi kehidupan, dalam dunia pendidikan nasional, mau tidak mau harus juga menyesuaikan dengan perubahan zaman yang semakin mutakhir ini. Pendidikan sebagai sarana penyalur ilmu pengetahuan (transfer knowledge) secara tidak langsung harus memiliki sistem yang dapat mendukung bagi terselenggaranya kegiatan tersebut.

. kemajuan IPTEK saat ini menjadikan anak-anak berbanding terbalik dengan moral bangsa yang terjajah di zaman millenial ini, tak hanya pada generasi milenial, kerusakan moral saat ini sudah sampai pada tahap yang sangat memprihatinkan, ada pada semua tingkatan masyarakat baik anak-anak, remaja bahkan orang dewasa yang seharusnya menjadi figur teladan moral bangsa yang baik. pendidikan sangat penting untuk merubah moral bangsa menjadi lebih baik dan dengan pendidikan kewarganegaraan yang sangat berperan aktif.

METODE

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan manusia. Banyak kemudahan dan inovasi yang diperoleh dengan adanya dukungan teknologi digital. Layanan menjadi lebih cepat dan efisien serta memiliki jangkauan koneksi yang lebih luas dengan sistem online. Namun demikian, digitalisasi program juga membawa dampak negatif bagi bangsa Indonesia menjadi moral bangsa yang berubah.

Yang menjadi rusaknya moral bangsa juga berpengaruh dalam globalisasi yaitu tren gaya hidup sekarang saat ini membuat bangsa kita hancur dalam bermoral. Sejenak melihat sekitar, menyadari akan fakta-fakta krisis moralitas yang terjadi, terlebih lagi ketika mengetahui bahwa bangsa ini mengalami bonus demografi, maka bangsa ini sedang berada di tepi jurang kehancuran dan hanya menunggu waktu untuk jatuh ke dalamnya. Hal itu sebagaimana pendapat Thomas Lickona, seorang pendidik

karakter dari Cortland University, menurut Thomas Lickona, sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran, jika memiliki sepuluh tanda-tanda yaitu meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, membudayanya ketidakjujuran, sikap fanatik terhadap kelompok, rendahnya rasa hormat kepada orangtua dan guru, semakin kaburnya moral baik dan buruk, penggunaan bahasa yang memburuk, meningkatnya perilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba, konsumsi alkohol dan seks bebas, rendahnya rasa tanggung jawab sebagai individu dan sebagai warga negara, menurunnya etos kerja, dan adanya rasa saling curiga dan kurangnya kepedulian diantara sesama.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa disetiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pelajaran yang terdiri dari Pendidikan Bahasa, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini menunjukan bahwa adanya Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter pribadi generasi muda. Agar peserta didik terlibat dalam proses pembudayaan nilai-moral diperlukan adanya proses pembelajaran yang memfasilitasi pengalaman mereka untuk mengetahui nilai-moral, mempraktekan nilai-moral, dan terbiasa berbuat sesuai dengan aturan moral yang berlaku. Dalam kaitan ini, UNESCO (United Nations for Education, Scientific and Cultural Organization) mengusulkan empat pilar belajar, yaitu: "learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together" (UNESCO, 1996) [1]. Penerapan empat pilar tersebut, dalam proses pembelajaran, memungkinkan peserta didik menguasai cara memperoleh pengetahuan,

berkesempatan menerapkan pengetahuan yang dipelajarinya, dan berkesempatan untuk berinteraksi secara aktif dengan sesama peserta didik sehingga dapat menemukan dirinya. Model pembelajaran seperti ini hanya dapat berlangsung dengan tenaga guru yang penuh konsentrasi, peralatan yang memadai, materi yang terpilih, dan waktu yang cukup tanpa harus mengejar target ujian nasional.

Ada kesan kuat bahwa baik guru, orang tua, maupun murid selalu didorong untuk mengejar dan menghimpun informasi keilmuan sebanyak mungkin, namun melupakan aspek pendidikan yang fundamental, yaitu bagaimana menjalani hidup dengan terhormat. Ketika pendidikan tidak lagi menempatkan prinsip-prinsip moralitas agung sebagai basisnya, maka akan menghasilkan orang yang selalu mengejar materi dan pemenuhan tuntutan physical happiness yang durasinya hanya sesaat dan potensial membunuh nalar yang sehat dan nurani terdalam (Hidayat, 2003:2)[2]. Pendidikan yang sehat adalah yang secara sadar membantu anak didik bisa merasakan, menghayati, dan menghargai jenjang makna hidup dari yang bersifat fisikal sampai yang estetikal, moral, dan spiritual (Bertens, 2000)[3].

Melihat situasi dan kondisi yang ada di lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah, maka patutlah menata dan merevitalisasi kembali model pendidikan dan pembudayaan nilai-moral yang selama ini berjalan. Dari pembelajaran yang cenderung indoktrinatif dan teoritis menuju ke arah pembudayaan yang lebih demokratis dan lebih berorientasi pada pengamalan dalam kehidupan sehari-hari melalui perubahan visi, misi, dan strategi pedagogis yang

sesuai untuk pendidikan dan pembudayaan nilai-moral (Bahmuller, 1996)[4]. Sampai sekarang tidak sedikit orang yang meyakini bahwa nilai itu berkembang dan dibina di sekitar keluarga, karena hubungan insani antara orang tua dengan anak di keluarga sangat dekat sehingga memungkinkan terjadinya pewarisan nilai yang intensif dalam setiap aktivitasnya, baik melalui sikap dan perbuatan maupun pemikiran (Raths et al., 1978:16)[5]. Namun, menurut hasil penelitian Thomas Lickona (1991:33)[6] ternyata bahwa orangtua hanya memiliki waktu rata-rata dua menit seharinya untuk berdialog secara bermakna dengan anaknya. Akibatnya, kembali menurut Louis Raths et al. (1978:17)[7], kesempatan untuk mendiskusikan kegiatan-kegiatan harian yang bermakna itu hilang. Akhirnya, anak akan menerima dan menginternalisasi nilai dari luar, salah satu di antaranya dari teman-teman sebaya. Pergaulan dengan teman sebaya akan menambah pembendaharaan informasi, yang akhirnya akan memengaruhi berbagai jenis kepercayaan yang dimiliki oleh anak (Djiwandono, 2004:93)[8].

HASIL

Problema kebangsaan yang dihadapi semakin kompleks, baik dalam skala nasional, regional maupun global, memerlukan solusi yang tepat, terencana dan terarah dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pemandu arah mempersiapkan generasi emas tahun 2045.

Seseorang dikatakan memiliki karakter yang baik, menurut Lickona (1994) dan Wuryandani, Fathurrohan & Ambarwati (2016:209)[9], adalah jika memenuhi komponen-komponen moral knowing, moral feeling, dan moral action. tanpa mengetahui komponen-komponen

tersebut diatas bangsa Indonesia akan hilang jati diri sedikit demi sedikit karena adanya perkembangan globalisasi dan di era disrupsi ini sangat rawan bila tidak mempunyai moral. Dalam konteks pendidikan, gejala melemahnya moralitas diperlihatkan dengan maraknya tawuran antar pelajar, siswa berada di pusat-pusat perbelanjaan dan hiburan pada saat jam belajar, percakapan dilakukan dengan kalimat yang tidak santun, berpakaian yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah, menggunakan asesoris yang tidak pantas, datang terlambat ke sekolah, tidak menunjukkan rasa hormat kepada guru, dan bahkan melakukan hubungan seks pranikah (Pikiran Rakyat, 29/7/2005). Semua fenomena tersebut mengindikasikan belum berhasilnya pendidikan nilai-moral secara memuaskan, baik di persekolahan maupun di luar persekolahan.

Mengapa dampak instruksional dan dampak pengiring dari tujuan pendidikan nasional dan semua mata pelajaran pendidikan nilai-moral itu terkesan tidak mengakar? Berbagai penelitian, seperti dihimpun oleh A. Kosasih Djahiri et al. (1998:4)[10], menunjukkan bahwa PMP (Pendidikan Moral Pancasila) atau PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) atau Penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) cenderung menitikberatkan pada penguasaan aspek pengetahuan dan mengabaikan pengembangan sikap dan keterampilan kewarganegaraan, dengan menggunakan pendekatan ekspositori yang cenderung indoktrinatif (Darmodihardjo, 1979)[11]. Senada dengan itu, Udin S. Winataputra menyatakan sebagai berikut:

Baik mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), atau sebelumnya Pendidikan Moral Pancasila (PMP), maupun dalam rangka

Penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), pembudayaan nilai-moral terkesan lebih banyak diajarkan atau taught dan bukan dipelajari atau learned dengan peran guru/ dosen/penatar/manggala yang lebih dominan. Sehingga situasi kelasnya pun lebih bersifat dominative dan bukan integrative. Dampak instruksional dan pengiringnya lebih bersifat pengetahuan atau knowledge oriented. Oleh karena itu dapat dipahami mengapa bangsa Indonesia dalam berbagai lapisan sosial terkesan belum mengamalkan nilai-nilai Pancasila (Winataputra, 2000:8)[12]. Kontroversi antara idealitas moral dengan realitas sosial, baik di sekolah maupun di masyarakat, menandakan perlu ditingatkannya pembudayaan nilai-moral secara integral melalui proses pendidikan, serta melalui proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada akhir abad ke-20, alat-alat komunikasi yang potensial telah diperkenalkan ke dalam ritualitas kehidupan keluarga (Bloch, 1986)[13]. Jika nilai memang mewakili cara pandang terhadap kehidupan, atau memberi arahan kehidupan, serta membuat perubahan dalam hidup, tentu setiap orang berharap adanya perhatian khusus terhadap perkembangan nilai anak-anak (Sumartana, 1994)[14]. Oleh karena itu, selayaknya media komunikasi mutakhir mengembangkan pandangan hidup yang sama sehingga memberikan stabilitas nilai pada anak.

Media memberikan variasi pandangan hidup yang tidak pernah ditemuinya di keluarga, sehingga membiaskan pandangan hidup yang seharusnya mereka warisi. Media sering menggunakan prinsip “bad issues is good

news”, sementara semua orang menonton, menyimak, dan mencernanya. Dalam konteks ini Stanley Cohen (1972:16) dan Keith Tester (2003:14)[15] dengan tegas menyatakan bahwa media telah lama sebagai agen kebejatan moral. Perkataan Keith Tester dan Stanley sangat menyakitkan karena media membuat pendidikan dan moral bangsa menjadi menurun hanya dikarenakan ditipu daya di era disrupti menjadikan kita tidak mempunyai moral yang layak, dengan itu bangsa harus membangun jati diri dan sadar di era disrupti yang membuat kita terpedaya dengan alat media elektronik yang canggih.

solusi agar moral bangsa dan peserta didik di era disrupti ini tidak terpedaya yaitu dengan memberikan memberikan penyadaran keadaan disrupti, meningkatkan aspek humanis pada pendidikan dan mengembangkan rasa tanggungjawab. Selain meningkatkan kesadaran, upaya lain yang telah dilakukan adalah mengembangkan nilai-nilai humanis dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. Suasana dan sikap individualis harus dikembalikan kepada keadaan yang humanis. Keadaan dan perkembangan teknologi tidak dibiarkan menganggu dan merusak tata nilai yang ada dimasyarakat, sekolah serta lingkungan lainnya.

Solusi agar pendidikan moral menjadi efektif adalah dengan menerapkan pendidikan karakter di setiap jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai pada pendidikan tinggi. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi konsumen pengetahuan, kesadaran dan kemauan dan tindakan

untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan sehingga menjadi insan kamil. Dengan penerapan pendidikan karakter, maka karakter dari peserta didik akan terbentuk sejak mereka berada di bangku sekolah dasar, kemudian dilanjutkan pada sekolah menengah dan perguruan tinggi. Dengan terbentuknya karakter tersebut, maka akan menjadi perisai atau kontrol dalam diri seseorang, sehingga akan mengendalikan perilaku orang tersebut. Jika karakter sudah terbentuk, maka akan sulit untuk mengubah karakter yang dulu.

Dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam setiap proses pendidikan, akan membantu proses pembentukan karakter dari peserta didik yang bermoral dan bermartabat. Dengan terbentuknya karakter tersebut, maka karakter tersebut akan sulit hilang sehingga akan menjadi watak perilaku seseorang dalam menjalani masa yang akan datang.

Penerapan pendidikan karakter dalam sistem kurikulum pendidikan dapat dilaksanakan dengan cara Menyiapkan nilai-nilai moral di setiap proses belajar mengajar, Membentuk kelas motivasi (motivation class), yang dalam hal ini lebih menekankan pada penggugahan motivasi internal peserta didik, Menambah mata pelajaran tentang pendidikan moral, dan peserta didik dipersyaratkan lulus mata pelajaran tersebut, Menyeimbangkan porsi antara materi belajar akal (cerdas) dan hati (moral). Adanya pendidikan yang tinggi bangsa Indonesia dapat menanamkan nilai moral di era disrupti saat ini.

SIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan yang penting karena sebagai basis pengembangan sikap dan kepribadian untuk membentuk warga negara yang memiliki karakter sesuai dengan Pancasila Menurut Ricardo L. Gracia, salah satu karakter warga negara Indonesia adalah yang menghargai identitas budaya masyarakat yang plural secara demokrati.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan manusia. Banyak kemudahan dan inovasi yang diperoleh dengan adanya dukungan teknologi digital.

rusaknya moral bangsa juga berpengaruh dalam globalisasi yaitu tren gaya hidup sekarang saat ini membuat bangsa kita hancur dalam bermoral. pendidikan karakter dalam sistem kurikulum pendidikan dapat merubah moral bangsa dengan cara Menyisipkan nilai-nilai moral di setiap proses belajar mengajar, Membentuk kelas motivasi (motivation class), yang dalam hal ini lebih menekankan pada penggugahan motivasi internal peserta didik, Menambah mata pelajaran tentang pendidikan moral, dan peserta didik dipersyaratkan lulus mata pelajaran tersebut, Menyeimbangkan porsi antara materi belajar akal (cerdas) dan hati (moral).

DAFTAR PUSTAKA

[1]UNESCO [United Nations for Education, Scientific and Cultural Organization]. (1996). International Commision on Education for the Twenty

First Century. Bangkok, Thailand: UNESCO.

[2] Hidayat, Komaruddin. (2003). Yang Terlewatkan dalam Pendidikan. Jakarta: Pembina SBI [Sekolah Berwawasan Internasional] Madania.

[3]Bertens, K. (2000). Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cetakan ke-5.

[4] Bahmuller, C.E. (1996). The Future of Democracy and Education for Democracy. Calabasas: CCE [Center for Civic Education].

[5] Raths, Louis et al. (1978). Values and Teaching: Working with Values in the Classroom. Columbus, USA: Charles E. Merril Publishing Company.

[6] Lickona, T. 1994. Educating for Character. New York: Routledge. Panduan Implementasi Kurikulum 2013.

[7] Raths, Louis et al. (1978). Values and Teaching: Working with Values in the Classroom. Columbus, USA: Charles E. Merril Publishing Company.

[8] Djiwandono, Sri Esti Wuryani. (2004). Psikologi Pendidikan. Jakarta: Penerbit Grasindo.

[9] Lickona, T. 1994. Educating for Character. New York: Routledge. Panduan Implementasi Kurikulum 2013.

[10] Ilham Hudi. (2017). Pengaruh Pengetahuan Moral Terhadap Perilaku Moral Pada Siswa SMP Negeri Kota Pekan Baru Berdasarkan Pendidikan Orangtua, Jurnal Moral Kemasyarakatan VOL.2, NO.1, Hal. 30-44

[11] Dasim, Budimansyah. (2010). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan

untuk Membangun Karakter Bangsa. Widya Aksara Press: Bandung.

[12] Winataputra, Udin S. 2014. "Memantapkan Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai Wahana Pendidikan Kebangsaan." Prosiding AP3KnI, Prodi PPKn FIS Universitas Manado, ISBN 978-602-71575-0-7.

[13] Dasim, Budimansyah. (2010). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa. Widya Aksara Press: Bandung.

[14] Fatimah Ibda. (2012). Pendidikan Moral Anak Melalui Pengajaran Bidang Studi Ppkn Dan Pendidikan Agama, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA VOL. XII NO. 2, hlm.338-347

[15] Glanzer, P.L. and A.J. Milson. 2006. "Legislating the Good: a Survey and Evaluation of Character Education Laws in the United States." Educational Policy, 20 (3) p. 525-550.